



**RELEVANSI ENSIKLIK *PACEM IN TERRIS* BAGI
PERJUANGAN GEREJA KATOLIK DALAM MENEGAKKAN
KEADILAN DAN PERDAMAIAN DI PAPUA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

Oleh

OKTOFIANUS LEHAN

NPM: 19.75.6649

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2026

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Oktofianus Lehan
2. NPM : 19.75.6649
3. Judul : Relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi Perjuangan Gereja Katolik dalam Menegakkan Keadilan dan Perdamaian di Papua

4. Pembimbing:

1. Dr. Antonio Camnahas
(Penanggung Jawab)
2. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic
3. Dr. Bernardus Boli Ujan

:
:
:

5. Tanggal Diterima

: 9 Agustus 2022

6. Mengesahkan:

Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui:

Rektor IFTK Ledalero



Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada

16 Mei 2026

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor,

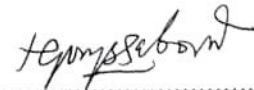
Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Dr. Antonio Camnahas

: 

2. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs, Lic.

: 

3. Dr. Bernardus Boli Ujan

: 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Oktofianus Lehan

NPM: 19.75.6649

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebut sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka. Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan atau sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 16 Mei 2026

Yang menyatakan



Oktofianus Lehan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oktofianus Lehan

NPM : 19.75.6649

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul:

“Relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi Perjuangan Gereja Katolik dalam Menegakkan Keadilan dan Perdamaian di Papua” perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero, Maumere

Pada tanggal : 16 Mei 2026

Yang Menyatakan



Oktofianus Lehan

KATA PENGANTAR

Penulis merasa terpanggil untuk mengkaji tulisan ini bermula ketika penulis pernah merasakan, mengalami dan melihat sendiri realitas kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Selain itu penulis juga membaca berbagai informasi di media massa tentang kasus-kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM, yang nilai kebenaran belum jelas. Realitas sosial kehidupan masyarakat Papua yang diwarnai dengan kekerasan, pelanggaran HAM yang acapkali terjadi antara masyarakat sipil, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia (TNI/POLRI). Penulis hendak melihat lebih jauh realitas kasus yang terjadi dan memperlajari akar persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua serta menawarkan solusi yang baik demi mengurangi atau mengetahui duduk persoalan Papua yang terus terjadi.

Kasus-kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua, sudah terjadi sejak Rezim Orde Baru. Awal Papua masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berbagai kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi direspon pemerintah Indonesia dengan pendekatan *militerisasi*. Banyak pengiriman anggota TNI dan POLRI ke Papua untuk mengatasi persoalan-persoalan di sana. Akan tetapi, usaha dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan sesuai dengan harapan. Melihat situasi yang terjadi, penambahan anggota TNI/POLRI terus dikerahkan. Di beberapa tempat dibangun markas/kodim untuk menjaga keamanan. Pendekatan militerisasi Indonesia di Papua tidak memberi titik terang untuk menciptakan keadilan dan perdamaian. Yang terjadi selanjutnya ialah pemberontakan, peperangan dan pertumpahan darah. Kekerasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM semakin tinggi. Pemerintah tidak punya solusi lain, sehingga terus mengadakan aparat keamanan, yang juga menjadi musuh bagi masyarakat Papua.

Perdamaian dunia menjadi keinginan dan harapan semua manusia. Tidak ada seorangpun yang tidak menginginkan kehidupan yang damai. Dalam penulisan

karya ini, penulis melihat kasus Papua dari sudut pandang Paus Yohanes XXIII, dalam ensikliknya *Pacem In Terris* yang berbicara tentang ‘Damai di Bumi’. Damai di bumi dalam ensiklik ini jelas menggambarkan situasi dunia yang semakin buruk akibat ulah manusia dengan kekerasan, ketidakadilan maupun pelanggaran HAM. Papua berada di situasi yang memprihatinkan, di mana keadilan dan perdamaian begitu jauh dari realitas kehidupan orang Papua. Masyarakat hidup dalam kecemasan dan ketakutan.

Situasi yang terjadi di Papua ini, mendorong penulis untuk mengkajinya dalam terang ensiklik *Pacem In Terris*, yang mana perdamaian menjadi satu kerinduan semua manusia (Papua). Penulis hendak melihat peran Gereja Katolik Papua dalam menanggapi dan memperjuangkan keadilan dan perdamaian di Papua. Gereja terpanggil untuk mengusahakan keadilan dan perdamaian. Atas dasar kemanusiaan dan kasih sukacita Allah, Gereja di Papua turut berpartisipasi dalam melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang terjadi.

Kesadaran akan realitas Papua yang demikian, memaksa Gereja dan setiap orang untuk bertanya, *apakah hukum di Indonesia ini ada? Berlakukah hukum itu di Papua?* Sejatinya hukum itu ada untuk melanggengkan keadilan dan perdamaian, bukan sebaliknya menjaga kepentingan pribadi dan kelompok. Kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua sepertinya tidak direspon dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Tanggapan Indonesia hanya dengan pendekatan militerisasi, penambahan jumlah TNI/POLRI dan yang juga memperkeruh situasi, sedangkan masih ada cara damai yang dapat ditempuh. Trauma dan ketakutan sudah melekat dalam diri orang Papua, sehingga yang terjadi adalah orang Papua melakukan penolakan, pemberontakan, perlawanan terhadap kehadiran TNI/POLRI dan Indonesia, lalu meneriakkan perdamaian dengan sebutan *Papua Merdeka*.

Penulis berasumsi bahwa, kasus ketidakadilan dan pelanggaran HAM di Papua tidak menjadi bagian dari Indonesia, sehingga tidak turut merasakan kesedihan dan tangisan orang Papua. Indonesia baru mampu menyuarakan keadilan di Papua, apabila negara benar-benar merasa bahwa Papua adalah juga milik Indonesia. Bukan hanya merasa memiliki sumber kekayaan alam yang ada

di Papua. Persoalan Papua tidak berpengaruh bagi Indonesia, sehingga tidak begitu besar upaya negara untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Padahal hal ini bertentangan dengan tugas negara, sebab negara berwenang dan bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan dan perdamaian hidup bernegara. Selama persoalan Papua tidak berpengaruh untuk Indonesia, timbul pertanyaan: lalu apa gunanya untuk negara?

Di sini jelas bahwa kehadiran Gereja adalah sebagai pembawa terang perdamaian dan pengharapan sangat dibutuhkan. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama, karena kedekatan kemanusiaan. Gereja turut berjuang menyuarakan suara-suara yang tak bersuara. Kehadiran Gereja menopang setiap harapan orang Papua yang mendambakan keadilan dan perdamaian di atas tanah sendiri. Sejatinya, Gereja dalam karya pewartaanya menaruh perhatian khusus pada persoalan kemanusiaan.

Dalam proses penyelesaian tulisan ini, penulis menyadari campur tangan dari banyak pihak. Kepada insan-insan berbudi luhur itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: Pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan bimbingan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini. Kedua, kepada Gregorius Sabon Kai Luli, Drs,Lic, sebagai dosen pembimbing yang dengan sabar membaca dan mengoreksi tulisan ini serta memberikan sumbangan pemikiran yang sungguh membuka wawasan berpikir penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Ketiga, kepada Dr. Antonio Camnahas, yang telah menguji dan memerikan beberapa catatan kritis bagi penulis dalam mempertanggung jawabkan tulisan ini. Keempat, kepada keluarga besar Organisasi Pencak Silat Pendidikan THS-THM Ranting Katedral St. Yoseph Maumere, organisasi MASYARAKAT Papua-Maumere, Komunitas Menulis Orang Muda Nusantara dan Komunitas Biara Karmel Maumere.

Keenam, kepada keluarga besar penulis di Manokwari-Papua Barat teristimewah kepada kedua orang tua alm. Bapak Bartolomeus Ribu dan Mama Bernadetha Da Guer yang telah melahirkan, membesarkan, serta mencintai Penulis dengan ketulusan. Ketujuh, kepada kakak Margaretha Sofia, Anastasya Rensi, dan adik Ignatius Safiola Alfaris, ketiga saudara Panulis yang senantiasa

menunjukkan cinta dan dukungan tanpa henti, kedua kakak ipar Suling dan Hillarius, serta aji Tino Nata, daeng Nino, om Barros dan om Yoppi. Kedelapan kepada, mama In Asan, kakak Mario Fernandez, kakak Shany, adik Jessica, Jenifer, Ifander dan Gilang yang mendukung dengan penuh cinta dan kesabaran. Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan rendah hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan tulisan ini.

IFTK Ledalero, Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Oktofianus Lehan, 19.75.6649. **Relevansi Ensiklik *Pacem In Terris* bagi Perjuangan Gereja Katolik dalam Menegakkan Keadilan dan Perdamaian di Papua**. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2026.

Papua kini dekat kaitannya dengan kasus kekerasan atas nama agama maupun pemerintah. Hal ini menjadi salah satu penyimpangan umat manusia akhir-akhir ini. Mulai dari kisah pemberontakan antar umat beragama sampai kedok pemboikotan lahan masyarakat untuk kepentingan pemerintah dengan berbagai varian cara memberikan cerminan atas merosotnya nilai perdamaian dan keadilan. Pada skala nasional, Papua menjadi semacam “di-anaktiri-kan”, demikian banyak persepsi yang dianut oleh masyarakat sipil. Bukan karena membenci eksistensi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan karena melihat dan merasakan perlakuan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap Hak dan Martabat orang Papua. Terdapat banyak faktor terkait kasus yang dinilai dan dianggap sebagai “ulah” dari pemerintah. Misalnya kehadiran markas militer yang semakin sering terjadi ke berbagai wilayah di Tanah Papua. Yang ditolak masyarakat adalah sistem militerisasi pemerintah, terutama dalam merespon setiap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sistem ini sepertinya menjadi senjata dalam penanganan kasus-kasus Papua, namun kenyataannya hanya memperparah keadaan.

Eksistensi manusia mulai diredam oleh pemikiran dan konsep pribadi yang terjerembab dalam konservatisme dan fundamentalisme, agama dan politik atau pun alasan lain yang dianggap tidak berpengaruh. Gereja di Papua sering ditindas dan dipersulit bila mempejuangkan kebenaran dan martabat manusia. Padahal di sana, agama Kristen menempati posisi teratas dari segi kuantitatif dan terlibat dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan di Papua. Artinya peran dan tanggung jawab Gereja sangat besar. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, masih banyak juga yang takut dan diam pada kenyamanan diri sendiri. Dengan situasi demikian, penulis ingin mengkaji sejauh mana peran dan eksistensi Gereja di Papua dalam menegakkan nilai keadilan dan perdamaian dalam terang Ensiklik *Pacem In Terris*, secara khusus yang merujuk pada konsep Paus Yohanes XXIII tentang Keadilan dan Perdamaian Dunia. Gereja menjadi rumah bagi setiap individu yang mendambakan kedamaian dan cinta kasih.

Kata Kunci : *Pacem In Terris*, Keadilan, Perdamaian, Kebebasan, Cinta Kasih, Hak Asasi Manusia, Misi Gereja.

ABSTRACT

Oktofianus Lehan, 19.75.6649. **The Relevance of the Encyclical *Pacem In Terris* to the Struggle of the Catholic Church in Upholding Justice and Peace in Papua.** Thesis. Undergraduate Program, Catholic Theology-Philosophy Study Program, Ledalero Institute of Philosophy and Creative Technology. 2026.

Papua is now closely related to cases of violence in the name of religion and the government. This has become one of the deviations of humanity lately. Starting from the story of rebellion between religious communities to the cover of boycotting community land for the benefit of the government with various variants of ways to reflect the decline in the value of peace and justice. On a national scale, Papua has become a kind of "child-ti-kan", so many perceptions are embraced by civil society. Not because they hate the existence of Papua as part of the Republic of Indonesia, but because they see and feel the unfair treatment and violation of the rights and dignity of Papuans. Here many case factors are assessed and considered as "actions" from the government. For example, the presence of military headquarters is increasingly rampant in various regions in the Land of Papua. What the public rejects is the government's militarization system, especially in responding to every case of human rights violations. This system seems to be a weapon in handling Papuan cases.

Human existence began to be suppressed by personal thoughts and concepts that were mired in conservatism and fundamentalism, religion and politics or other reasons that were considered influential and meaningless. The existence of some minority religions has become a soft material for oppression and harassment. In fact, Christianity occupies the top position in terms of quantitative. This means that the role and responsibility of the Church is very large. But what happened was the opposite. With such a situation, the author would like to examine the extent of the role and existence of the Church in the Land of Papua in upholding the values of justice and peace in the light of the Encyclical *Pacem In Terris*, specifically referring to Pope John XXIII's concept of World Justice and Peace. The Church becomes a home for every individual who longs for peace and love.

Keywords : *Pacem In Terris*, Justice, Peace, Freedom, Charity, Human Rights, Church Mision.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBARAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penulisan.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan.....	6
1.5 Sistematikan Penulisan.....	7
BAB II MENGENAL PAUS YOHANES XXIII DAN	
MENDALAMI PEMIKIRANNYA TENTANG KONSEP	
KEADILAN DAN PERDAMAIAN DALAM ENSIKLIK	
<i>PACEM IN TERRIS</i>	8
2.1 Mengenal Paus Yohanes XXIII.....	8
2.1.1 Riwayat Hidup Yohanes XXIII	8
2.1.2 Kepemimpinan Religius Paus Yohanes XXIII Selama Konflik	
Mondial Perang Dunia II.....	11
2.1.3 Warisan Ensiklik Paus Yohanes XXIII.....	14
2.2 Latar Belakang Munculnya Ensiklik <i>Pacem In Terris</i>	15
2.3 Konsep Dasar Perdamaian Menurut Paus Yohanes XXIII dalam	
Ensiklik <i>Pacem In Terris</i>	17
2.3.1 Kebenaran.....	17

2.3.2 Keadilan.....	19
2.3.3 Cinta Kasih	21
2.3.4 Kebebasan.....	24
2.4 Pokok Pikiran Ensiklik <i>Pacem In Terris</i>	26
2.4.1 Pengakuan Atas Hak dan Kewajiban setiap Individu	27
2.4.2 Hak-hak	28
2.4.3 Kewajiban-kewajiban	30
2.4.4 Hubungan antar Masyarakat dengan Para Pemimpin Negara	32
2.4.5 Hubungan Antarnegara.....	33
2.4.6 Perlombaan Senjata	35
2.4.7 Mencari Damai yang Sejati	37
BAB III PERAN GEREJA KATOLIK DI PAPUA UNTUK	
MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DAN KEADILAN	
DALAM TERANG ENSIKLIK <i>PACEM IN TERRIS</i>	39
3.1 Catatan Awal Tentang Papua.....	39
3.2 Pelanggaran HAM di Papua	41
3.3 Catatan Awal Sejarah Masuknya Gereja ke Tanah Papua	44
3.4 Memoria Passionis Rakyat Papua.....	48
3.4.1 Sikap Pemerintah Terhadap Kehidupan Hak dan Budaya Papua	52
3.4.2 Pemerintah Hadir dengan Sistem Militerisasi dalam Merespon Kasus Pelanggaran HAM	54
3.5 Peran Gereja dalam Berbagai Bidang Kehidupan	59
3.5.1 Sosial Politik.....	59
3.5.2 Ekonomi	61
3.5.3 Pendidikan dan Budaya	63
3.5.4 Layanan Kesehatan	64
3.5.5 Karya Pastoral.....	66
3.6 Relevansi Ensiklik <i>Pacem In Terris</i> bagi Perjuangan Gereja dalam Menegakan Keadilan dan Perdamaian di Tanah Papua.....	68
3.7 Harapan Bersama	70
3.7.1 Dialog sebagai Jalan Damai.....	70
3.7.2 Hubungan yang Baik Lintas Agama	71

3.7.3 Hubungan yang Baik Antara Pemimpin Agama dengan Pemerintah	72
3.7.4 Kecintaan Terhadap Iman dan Negara	73
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81